

## **ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (STUDI PADA SMK NEGERI 1 YOGYAKARTA)**

### ***ANALYSIS OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE (BOS) FUNDS MANAGEMENT***

Oleh : **Ismi Solikhatusun**

Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta  
ismisolikhatusun@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan kuisinoer, wawancara, serta dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 70%, prinsip transparan dilaksanakan secara cukup baik dengan nilai kecenderungan cukup baik 78% dan sekolah telah menyebarkan informasi penerimaan BOS kepada warga sekolah, prinsip akuntabel dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 96%, prinsip demokratis dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 74%, prinsip efektif dan efisien dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 63%, prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 100% dan sekolah telah melakukan pelaporan, prinsip saling percaya dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 89%.

Kata kunci: Pengelolaan, Dana Bantuan Operasional Sekolah, SMK Negeri 1 Yogyakarta

#### **Abstract**

*This study aimed to determine the analysis of fund management School Operational Assistance (BOS) at Vocational High School 1 of Yogyakarta. This study used descriptive method with quantitative approach. Data collection used questionnaire, interview and documentation. Data collected was analyzed by quantitative descriptive method. The result showed that the School Operational Assistance (BOS) fund management at 1 Vocational High School of Yogyakarta considering principal of self-management and participatory was well-executed with good propensity score as much as 70%, the transparent principle was good enough executed with sufficient propensity score as much as 78% and the school already delivered the information of receiving School Operational Assistance (BOS) fund to schools, the accountable principle was well implemented with good propensity score as much as 96%, democracy principle was well implemented with good propensity score as much as 74%, effective and efficient principle was well implemented with good propensity score as much as 63%, correct-administration and report principle was well implemented with good propensity score as much as 100% and the school already delivered the report, as well as mutual trust principle which was well implemented with good propensity score as much as 89%.*

*Keywords: management, School Operational Assistance (BOS) fund, Vocational High School 1 of Yogyakarta*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli akan pendidikan dan dapat tergambarkan dari pencapaian pendidikan warga negaranya. Pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan. Di Indonesia, menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Salah satu hal yang tidak dapat dilupakan dalam mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa adalah peran negara dalam menyediakan sarana pendidikan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia.

Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah yang terdaftar pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP).

Dana BOS memang sangat membantu percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun di Indonesia, yang dibuktikan dengan jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD pada tahun 2005 telah mencapai 115% sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11% ([bos.kemendikbud.go.id](http://bos.kemendikbud.go.id)), namun masih banyak siswa lulusan SMP yang putus sekolah dan tidak melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk itu pemerintah telah mencanangkan dan melaksanakan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) sejak tahun 2013.

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat. Dalam peraturan tersebut

juga disebutkan bahwa salah satu sasaran penyelenggaraan PMU adalah mempercepat pencapaian APK pendidikan menengah menjadi 97% pada tahun 2020. Pendidikan Menengah Universal (PMU) bertujuan untuk memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah menyusun program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menengah yang disalurkan kepada seluruh SMA dan SMK baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Dana BOS yang diberikan kepada sekolah menengah atas disebut dengan BOS SMA. Sedangkan dana BOS yang diberikan kepada sekolah kejuruan disebut dengan BOS SMK.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan dengan besarnya satuan dana bantuan. Tujuan umum BOS SMK adalah mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah dikalikan satuan biaya BOS SMK. Satuan biaya (*unit cost*) program BOS SMK sebesar Rp600.000,00 per siswa per semester.

Adapun total anggaran program BOS SMK untuk tahun anggaran 2015 menurut Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOS 2015 sebesar Rp5.267.118.000.000,00. Jumlah tersebut diberikan setiap semester dalam dua periode pemberian bantuan yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember tahun 2015.

Peranan BOS SMK adalah memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu dengan mewajibkan sekolah memberikan keringanan/pengurangan biaya operasional sekolah kepada siswa. Dana BOS yang diterima akan diperhitungkan untuk meringankan beban semua siswa pada sekolah tersebut secara rata-rata. Adapun penggunaan dana BOS SMK menurut Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah atau personalia.

Pelaksanaan dan pengelolaan program BOS SMK harus mengikuti pedoman yang disusun oleh Pemerintah dalam Petunjuk Teknis BOS SMK dengan mengutamakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pengelolaan dana BOS berdasarkan Petunjuk Teknis BOS SMK terdiri dari 7 prinsip. Prinsip tersebut terdiri dari prinsip swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya.

Pengelolaan dana BOS di sekolah belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Hasil Pemeriksaan BPK Semester I tahun 2015 menyatakan terdapat beberapa masalah terkait pengelolaan dana BOS ([republika.co.id](http://republika.co.id)). Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan BOS ditinjau dari 7 prinsip pengelolaan BOS, maka diperlukan suatu analisis. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis pengelolaan BOS penting dilakukan, namun banyak pihak yang belum melaksanakan analisis mengenai pelaksanaan pengelolaan dana BOS. Salah satu sekolah yang menerima pendanaan BOS SMK pada tahun 2015 adalah SMK Negeri 1 Yogyakarta. Sebagai salah satu sekolah yang menerima pendanaan BOS, maka SMK Negeri 1 Yogyakarta harus melakukan pengelolaan dana BOS sesuai dengan 7 prinsip pengelolaan BOS.

Melihat arti pentingnya analisis pengelolaan program BOS dalam penyelenggaraan pendidikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi pada SMK Negeri 1 Yogyakarta)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Negeri 1 Yogyakarta.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan berbagai kondisi, situasi atau variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi (Burhan, 2009:36).

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di SMK Negeri 1 Yogyakarta yang beralamat di Jl Kemetiran Kidul No 35 Yogyakarta. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret 2016 sampai April 2016.

### **Target/Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah tim pengelola BOS, komite sekolah dan wali murid SMK Negeri 1 Yogyakarta. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditinjau dari 7 prinsip pengelolaan dana BOS berdasarkan Petunjuk Teknis BOS SMK 2015 yang meliputi prinsip swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya.

## Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

### a. Kuisisioner

Kuisisioner ini digunakan untuk memperoleh data secara subjektif dari internal sekolah yang terdiri dari staf pengelola BOS dan komite sekolah mengenai pelaksanaan pengelolaan BOS ditinjau dari 7 prinsip pengelolaan berdasarkan Petunjuk Teknis BOS SMK tahun 2015. Kuisisioner ini diberikan kepada Staf pengelola BOS serta komite sekolah. Instrumen yang digunakan adalah kisi-kisi kuisisioner dari 7 prinsip pengelolaan.

### b. Dokumentasi

Penggunaan dokumen dalam penelitian ini untuk memperoleh data secara objektif pengelolaan dana BOS SMK ditinjau dari segi pelaporan dan tertib administrasi. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen mengenai profil sekolah serta data pengelolaan dana BOS. Instrumen yang digunakan adalah pedoman dokumentasi dengan *checklist*.

### c. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada 3 orang tua /wali murid SMK Negeri 1 Yogyakarta. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data secara subyektif tentang pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah, keterlibatan orang tua siswa dalam partisipasi, dan

transparansi pengelolaan dana BOS sekolah terhadap orang tua/wali murid. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara yang berisi pertanyaan.

## Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis data dilakukan dengan bantuan program *microsoft excel*. Ada dua langkah analisis yang dilakukan yaitu teknik analisis data responden yang meliputi *mean, median, modus* dan tabel distribusi frekuensi serta analisis varians atau dispersi untuk mengetahui simpangan baku.

Hasil analisis data pengelolaan dana BOS kemudian dikategorikan ke dalam 3 kelompok kategori. Pengkategorian tersebut didasarkan pada nilai rerata dan simpangan baku pada masing-masing variabel penelitian. Tiga kategori kecenderungan menurut Anas (2006:176) yaitu:

$$\text{Baik} = M_i + 1S_{di} < X$$

$$\text{Cukup Baik} = M_i - 1S_{di} \leq X \leq M_i + 1S_{di}$$

$$\text{Kurang Baik} = X < M_i - 1S_{di}$$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

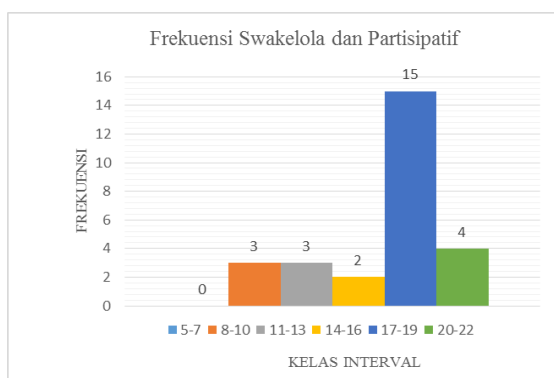
SMK Negeri 1 Yogyakarta melaksanakan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan 7

prinsip pengelolaan. Tujuh prinsip pengelolaan terdiri dari:

1. Prinsip Swakelola dan Partisipatif

Prinsip swakelola adalah direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri sedangkan prinsip partisipatif adalah melibatkan warga sekolah dan masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku

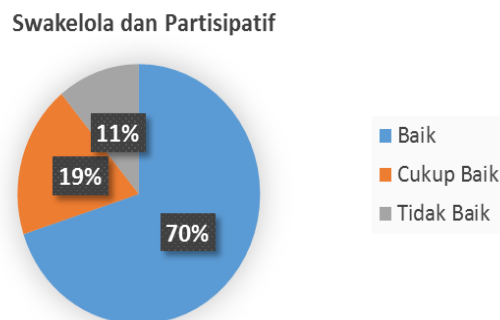
Prinsip swakelola dan partisipatif diukur dengan menggunakan kuisioner yang terdiri dari 5 pernyataan. Hasil pengukuran berupa skor tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan *software SPSS Statistics 20* sehingga diperoleh *mean* sebesar 16,56 , median sebesar 19 , modus sebesar 19 dan simpangan baku sebesar 3,955. Adapun hasil distribusi frekuensi dari prinsip swakelola dan partisipatif adalah:



Gambar 1. Histogram Frekuensi Swakelola dan Partisipatif

Langkah selanjutnya adalah menghitung kecenderungan. Hasil

perhitungan kecenderungan dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 2. Diagram Kecenderungan Prinsip Swakelola dan Partisipatif

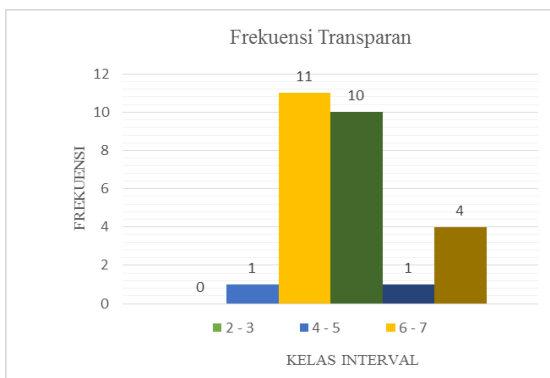
. SMK Negeri 1 Yogyakarta telah melaksanakan swakelola dengan membentuk tim belanja barang sendiri untuk pengelolaan dana BOS. Dari segi prinsip partisipasi, bentuk partisipasi yang diberikan adalah dengan melibatkan wakil orang tua siswa atau komite sekolah tidak tetap dalam rapat dewan guru bersama orang tua siswa. Berdasarkan hasil statistik deskriptif SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam pengelolaan dana BOS telah melaksanakan prinsip swakelola dan partisipatif dengan baik dengan nilai kecenderungan baik sebesar 70%.

2. Prinsip Transparan

Prinsip transparan menekankan bahwa pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan kritik, saran serta melakukan pengawasan dan

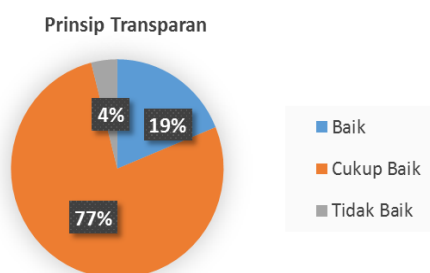
pengendalian terhadap pelaksanaan program.

Prinsip transparan diukur dengan menggunakan wawancara dan kuisioner yang terdiri dari 3 pernyataan. Hasil kuisioner kemudian diolah dan dianalisis menggunakan *software SPSS Statistics 20* sehingga diperoleh *mean* sebesar 8,41, *median* sebesar 9, modus sebesar 9 dan simpangan baku sebesar 2,024. Hasil jawaban kuisioner responden disajikan dalam tabel distribusi berikut:



Gambar 3. Histogram Frekuensi Prinsip Transparan

Langkah selanjutnya adalah menghitung kecenderungan. Hasil perhitungan kecenderungan dapat dilihat pada diagram berikut:



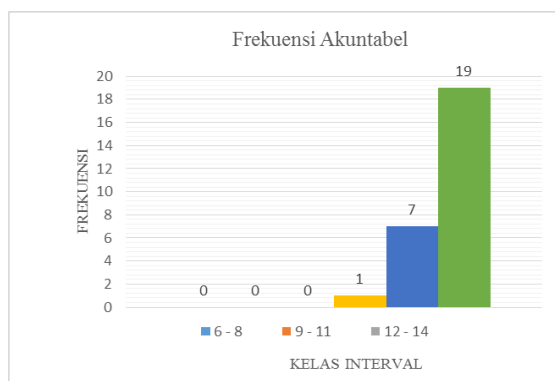
Gambar 4. Diagram Kecenderungan Prinsip Transparan

SMK Negeri 1 Yogyakarta melakukan penyebaran informasi dengan menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah/orang tua siswa ketika awal tahun ajaran baru dalam rapat dewan guru dan orang tua siswa. Belum ada orang tua siswa yang mengajukan pertanyaan terkait dengan penggunaan atau pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Yogyakarta. Orang tua siswa belum pernah mengajukan kritik ataupun saran terhadap pengelolaan BOS walaupun sekolah telah memfasilitasi baik secara langsung dalam rapat orang tua wali murid atau secara tidak langsung melalui kontak sekolah. Berdasarkan hasil statistik deskriptif SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam pengelolaan dana BOS telah melaksanakan prinsip transparan dengan cukup baik dengan kecenderungan nilai baik sebesar 78%.

### 3. Prinsip Akuntabel

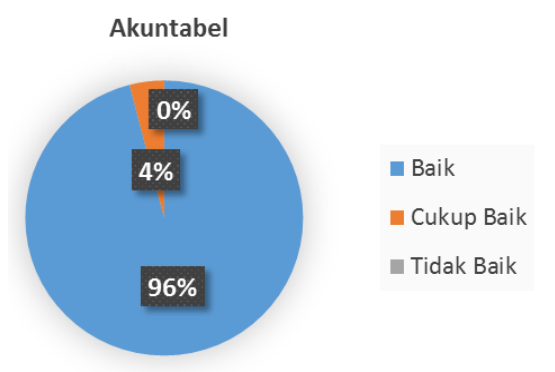
Prinsip akuntabel adalah pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang sudah disepakati. Prinsip akuntabel diukur dengan menggunakan kuisioner yang terdiri dari 6 pernyataan. Hasil kuisioner kemudian diolah dan dianalisis menggunakan *software SPSS Statistics 20* sehingga diperoleh *mean*

sebesar 22,22 , median sebesar 23 , modus sebesar 24 dan simpangan baku sebesar 2,326. Hasil jawaban responden disajikan dalam tabel distribusi berikut:



Gambar 5. Histogram Frekuensi Prinsip Akuntabel

Langkah selanjutnya adalah menghitung kecenderungan. Hasil perhitungan kecenderungan dapat dilihat pada diagram berikut:



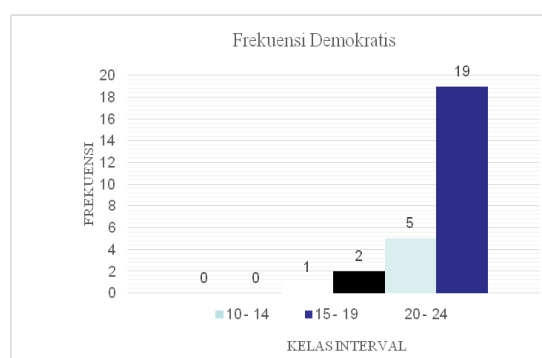
Gambar 6. Diagram Kecenderungan Prinsip Akuntabel

Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa prinsip demokratis memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 96% dan SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam pengelolaan dana BOS telah melaksanakan pertanggungjawaban

sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan prinsip akuntabel dengan baik.

#### 4. Prinsip Demokratis

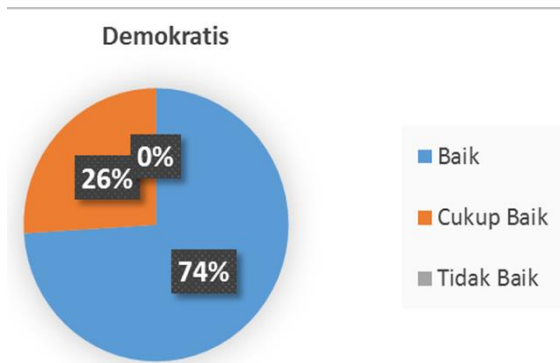
Prinsip demokratis adalah penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat. Prinsip demokratis diukur dengan menggunakan wawancara serta kuisioner yang terdiri dari 10 pernyataan. Skor tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan *software SPSS Statistics 20* sehingga diperoleh mean sebesar 35,30 , median sebesar 36, modus sebesar 40 dan simpangan baku sebesar 4,513



Gambar 7. Histogram Frekuensi Prinsip Demokratis

Langkah selanjutnya adalah menghitung kecenderungan. Hasil perhitungan kecenderungan dapat dilihat pada diagram berikut:





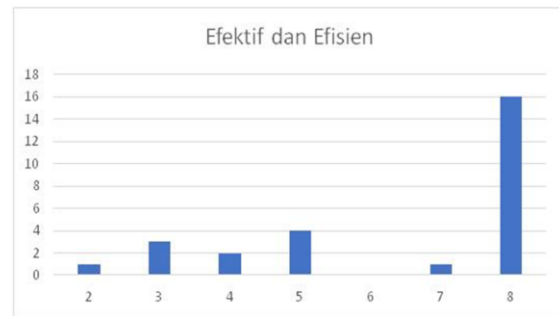
Gambar 8. Diagram Kecenderungan Prinsip Akuntabel

Berdasarkan hasil wawancara, prinsip demokratis dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada orang tua siswa untuk memberikan saran, kritik atau pendapat, namun belum ada orang tua siswa yang memberikan saran, kritik dan pendapat terkait pelaksanaan program BOS. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa prinsip demokratis memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 74% dan SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam pengelolaan dana BOS telah melaksanakan prinsip demokratis dengan baik.

#### 5. Prinsip Efektif dan Efisien

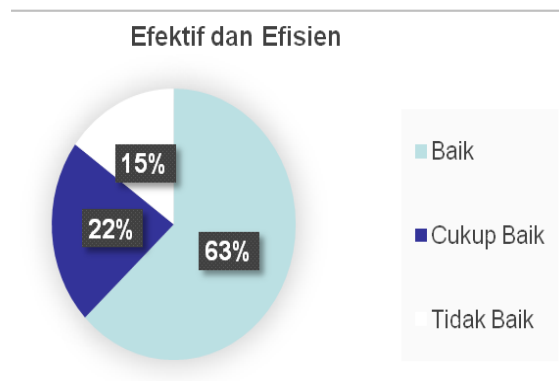
Prinsip efektif dan efisien diukur dengan menggunakan kuisioner yang terdiri dari 2 pernyataan. Hasil kuisioner kemudian diolah dan dianalisis menggunakan software *SPSS Statistics 20* sehingga diperoleh *mean* sebesar 6,44, *median* sebesar 8, modus sebesar 8 dan simpangan baku sebesar

2,10. Adapun hasil distribusi frekuensi dari prinsip efektif dan efisien adalah:



Gambar 9. Histogram Frekuensi Prinsip Efektif dan Efisien

Langkah selanjutnya adalah menghitung kecenderungan. Hasil perhitungan kecenderungan dapat dilihat pada diagram berikut:

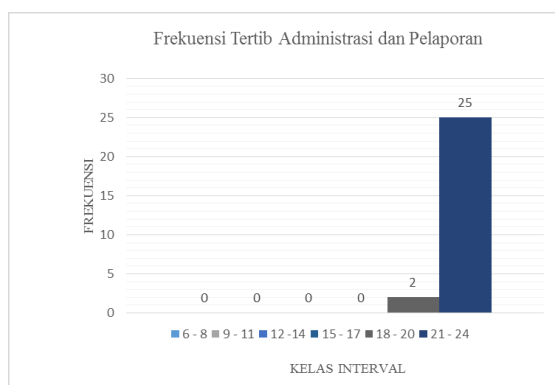


Gambar 10. Diagram Kecenderungan Prinsip Akuntabel

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai kecenderungan baik prinsip efektif dan efisien sebesar 63% dan SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam pengelolaan dana BOS telah melaksanakan prinsip efektif dan efisien dengan baik.

#### 6. Prinsip Tertib Administrasi dan Pelaporan

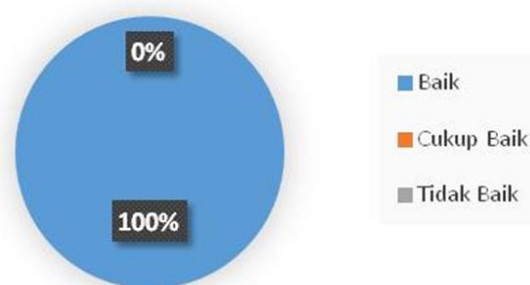
Prinsip tertib administrasi dan pelaporan adalah sekolah penerima dana harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. Prinsip tertib administrasi dan pelaporan diukur dengan menggunakan dokumentasi dan kuisioner yang terdiri dari 6 pernyataan. Hasil kuisioner kemudian diolah dan dianalisis menggunakan *software SPSS Statistics 20* sehingga diperoleh *mean* sebesar 23,41, *median* sebesar 24, modus sebesar 24 dan simpangan baku sebesar 1,551.



Gambar 11. Histogram Frekuensi Prinsip Tertib Administrasi dan Pelaporan

Langkah selanjutnya adalah menghitung kecenderungan. Hasil perhitungan kecenderungan dapat dilihat pada diagram berikut:

Tertib Administrasi dan Pelaporan



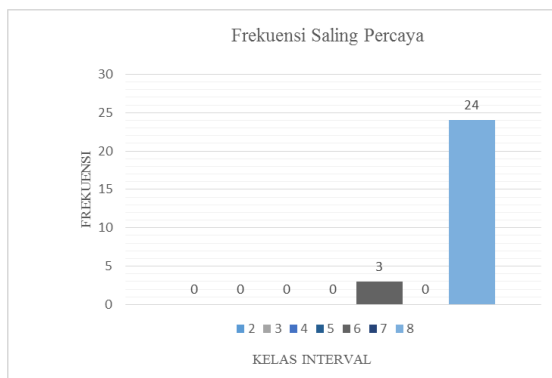
Gambar 12. Diagram Kecenderungan Prinsip Administrasi Dan Pelaporan

Berdasarkan hasil dokumentasi SMK Negeri 1 Yogyakarta telah melaksanakan pembukuan dana baik administratif dan pelaporan. Pembukuan dana BOS tahun 2015 baik secara administratif maupun pelaporan meliputi: buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku kas pembantu tunai, buku kas pembantu bank, bukti pengeluaran dana BOS, MOU BOS, laporan pelaksanaan program, laporan ringkas, laporan keseluruhan, dan laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa prinsip administrasi dan pelaporan memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 100% dan SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam pengelolaan dana BOS telah melaksanakan prinsip tertib administrasi dan pelaporan dengan baik.

#### 7. Prinsip saling percaya

Pemberian dana BOS berlandaskan rasa saling percaya antara

pemberi dan penerima, termasuk warga sekolah dan masyarakat. Prinsip saling percaya diukur dengan menggunakan wawancara dan kuisioner yang terdiri dari 2 pernyataan. Hasil kuisioner kemudian diolah dan dianalisis menggunakan *software SPSS Statistics 20* sehingga diperoleh mean sebesar 7,78 , median sebesar 8, modus sebesar 8 dan simpangan baku sebesar 0,641.



Gambar 13. Histogram Frekuensi Prinsip Saling Percaya

Langkah selanjutnya adalah menghitung kecenderungan. Hasil perhitungan kecenderungan dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 14. Diagram Kecenderungan Prinsip Saling Percaya

Berdasarkan hasil wawancara, orang tua siswa percaya bahwa SMK Negeri 1 Yogyakarta sebagai penerima dana BOS telah melaksanakan pengelolaan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun orang tua siswa tidak percaya kepada pemerintah selaku pemberi dana dalam melaksanakan tugasnya tanpa melakukan tindak kecurangan. Hasil statistik deskriptif menunjukkan prinsip saling percaya memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 100% dan SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam pengelolaan dana BOS telah melaksanakan prinsip saling percaya dengan baik.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 70%. Prinsip transparan dilaksanakan dengan cukup baik karena memiliki nilai kecenderungan cukup baik sebesar 78% dan sekolah telah menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS kepada warga sekolah dengan menyampaikan informasi dalam rapat dewan guru dengan komite/orang tua siswa pada awal tahun ajaran. Prinsip akuntabel dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 96%. Prinsip

demokratis dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 74%. Prinsip efektif dan efisien dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 63%. Prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 100% dan sekolah telah melakukan pelaporan baik laporan keseluruhan maupun laporan ringkas. Prinsip saling percaya dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 89%.

### **Saran**

- a. Sekolah bersama komite sekolah mensosialisasikan kepada orang tua bahwa semua siswa menerima BOS.
  - b. Sekolah diharapkan dapat memberitahu mengenai laporan penggunaan dana BOS untuk apa saja agar orang tua mengetahui bagaimana pengelolaan dana BOS di sekolah.
  - c. Penelitian selanjutnya dapat menambah responden penelitian yaitu Dinas Pendidikan untuk mengetahui tingkat pertanggungjawaban/akuntabilitas sekolah secara vertikal.
  - d. Diperlukan suatu pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis bagi sumberdaya manusia khususnya pengelola BOS agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai Petunjuk Teknis dengan benar.
- Pengelola dana BOS perlu ditingkatkan melalui pendidikan lanjut agar pengelola dana BOS betul-betul memahami petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang BOS serta mampu memahami uraian tugas pengelola BOS.
- e. Pemerintah Pusat (Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah) diharapkan membuat format pelaporan dan administrasi yang lebih sederhana sehingga memudahkan dalam pengelolaan dana BOS.
  - f. Petunjuk Teknis harus selalu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan karena masih terdapat aturan di petunjuk teknis yang tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan dan pelaksanaan dana BOS.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. (2012). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). <http://bos.kemdikbud.go.id/home/about> , diakses tanggal 19 Novermber 2015. Anas Sudijono. (2006). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Burhan Bungin. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013

tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Petunjuk Teknis 2015 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK.

Republika. (2016). *DPD Soroti Temuan BPK Terkait Pengelolaan Dana BOS*. Melalui <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/22/o1c62k359-dpd-soroti-temuan-bpk-terkait-pengelolaan-dana-bos> pada tanggal 17 Mei 2016.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.